**Nama : M Faridz Putra Sila**

**NPM : 2456041048**

**Kelas : Mandiri B**

**Perspektif Administrasi Negara Dalam Keberagaman SARA di Indonesia**

**BAB II**

**Tinjauan Pustaka**

**A. Pendahuluan**

Bab ini membahas tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan administrasi negara dan dinamika politik keberagaman SARA di Indonesia, dikaitkan dengan pendekatan kuantitatif. Fokus utama adalah memberikan dasar konseptual dan kerangka analisis yang mendukung penelitian berbasis data numerik dan statistik. Pendekatan kuantitatif dinilai tepat untuk menguji hubungan antar variabel serta menggambarkan pola persepsi dan dampak administrasi pada pengelolaan konflik SARA secara objektif.

Dalam konteks Indonesia, keberagaman SARA merupakan fenomena kompleks yang memengaruhi perilaku sosial dan kebijakan administrasi negara. Oleh karena itu, pengukuran kuantitatif menjadi penting guna menyediakan data empiris yang akurat untuk analisis dan pembuatan kebijakan yang evidence based. Kajian ini mengintegrasikan berbagai sumber data kuantitatif nasional maupun regional, serta penelitian ilmiah yang relevan, guna memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi administrasi publik yang dihadapkan pada keberagaman masyarakat.

Pendekatan kuantitatif yang digunakan meliputi survei dan analisis statistik dengan instrumen kuesioner yang diolah menggunakan perangkat lunak statistik untuk menemukan korelasi, regresi, dan pengaruh antar variabel. Hal ini memungkinkan untuk mengukur tingkat efisiensi pelayanan publik, persepsi masyarakat terhadap birokrasi, serta dampak politisasi SARA terhadap stabilitas sosial dan pembangunan administrasi negara secara sistematis dan terukur.

**B. Kajian Teori**

**1. Administrasi Publik dan Keberagaman SARA**

Administrasi publik merupakan fungsi pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan sumber daya secara profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Dalam konteks keberagaman Indonesia yang multi-etnis dan multi-agama, administrasi negara menghadapi tantangan unik dalam mengelola potensi konflik antar kelompok berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan).

Menurut Masagung (n.d.), administrasi negara harus mampu membangun kebijakan inklusif yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Nugroho (1999) menegaskan bahwa kegagalan administrasi dalam mengakomodasi keberagaman SARA dapat menimbulkan konflik horizontal yang mengganggu ketertiban dan harmoni sosial.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa selama periode 2015-2023, kasus politisasi isu SARA meningkat secara signifikan di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, dengan tingkat konflik yang berpotensi menggangu kerukunan masyarakat mencapai 15-20% di wilayah tersebut (BPS, 2023). Politisasi SARA sering dimanfaatkan dalam kontestasi politik, terutama Pilkada dan Pemilu, untuk mendongkrak elektabilitas calon tertentu melalui pengkonstruksian identitas kelompok (LIPI, 2023).

Selain itu, administrasi publik harus memperkuat mekanisme inklusif seperti penyuluhan toleransi, pelibatan partisipasi masyarakat, dan distribusi sumber daya yang adil agar dapat mengurangi tensi SARA (Dewi & Hartono, 2019). Kajian kuantitatif menunjukkan korelasi negatif kuat antara tingkat inklusivitas administrasi dengan kejadian konflik berbasis SARA (-0.65, p<0.01) pada data survei 500 responden di wilayah rawan konflik (Adi & Wahyudi, 2020).

**2. Metode Kuantitatif dalam Penelitian Administrasi Publik**

Metode kuantitatif secara luas digunakan dalam studi administrasi publik untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik yang memungkinkan pengujian hipotesis dan verifikasi teori administrasi secara empiris (Creswell, 2014). Pendekatan ini menekankan pada pengukuran variabel dengan instrumen standar dan analisis statistik yang dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan reliabel.

Di Indonesia, survei menjadi salah satu teknik kuantitatif utama dalam penelitian administrasi publik. Survei ini biasanya menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi, sikap, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan birokrasi (Sugiyono, 2017). Contoh konkret, survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 melibatkan 80 responden dengan analisis deskriptif dan inferensial menggunakan SPSS menghasilkan skor kepuasan rata-rata 72,5% yang dengan regresi menunjukkan pengaruh positif signifikan praktis pelayanan terhadap kepercayaan masyarakat (Ismail et al., 2023).

Metode analisis lain yang kerap digunakan termasuk regresi linier untuk memprediksi dampak variabel bebas (misalnya politisasi SARA) terhadap variabel tergantung (misalnya efektivitas administrasi). Teknik uji hipotesis seperti uji t, uji F, dan analisis korelasi Spearman atau Pearson juga sering dipakai untuk menguji hubungan antar variabel dalam data kuantitatif (Santoso, 2018).

Secara umum, metode kuantitatif menyediakan data yang kuat untuk perumusan kebijakan berbasis bukti, evaluasi program pelayanan, serta pemantauan dan prediksi dinamika sosial yang memengaruhi administrasi negara, khususnya dalam konteks pengelolaan keberagaman.

**3. Variabel dan Indikator**

Dalam penelitian kuantitatif ini, variabel utama yang dianalisis terbagi menjadi:

* Variabel Independen: Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap politisasi SARA dan pengelolaan keberagaman, meliputi:
	+ Tingkat politisasi SARA (diukur dari frekuensi penggunaan isu SARA dalam kampanye politik dan opini publik terkait)
	+ Kualitas pelayanan publik (dinilai dari kecepatan, ketepatan, dan keadilan pelayanan)
	+ Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (diukur dari responden yang aktif dalam forum publik atau musyawarah)
* Variabel Dependen:
	+ Efektivitas administrasi dalam menjaga kerukunan (diukur melalui tingkat persepsi keamanan, frekuensi konflik yang dilaporkan, dan kepuasan masyarakat terhadap kebijakan)
	+ Stabilitas sosial dan tingkat konflik berbasis SARA (diukur dengan data insiden dan laporan polisi, serta survei persepsi masyarakat)

Indikator pengukuran distandarisasi menggunakan skala Likert (1-5) dan skor persentase untuk variabel deskriptif. Contohnya, data survei nasional tahun 2024 yang dilakukan terhadap 1.000 responden memperlihatkan skor politisasi SARA rata-rata sebesar 3,8, kualitas pelayanan 3,5, dan stabilitas sosial sebesar 4,2 pada skala Likert (Bawaslu RI, 2024).

Penggunaan teknik statistik deskriptif memungkinkan identifikasi pola distribusi variabel, sementara analisis inferensial seperti regresi berganda membantu menguji hubungan kausal dan signifikansi pengaruh antar variabel. Data juga diolah menggunakan software statistik seperti SPSS atau Stata untuk memastikan validitas dan reliabilitas data.

**C. Penelitian Terdahulu**

Dalam konteks administrasi publik yang menangani keberagaman SARA, terdapat sejumlah penelitian kuantitatif yang memberikan wawasan empiris. Dewi dan Hartono (2019) melakukan survei dengan metode kuantitatif dan analisis regresi terhadap 600 sampel masyarakat di wilayah DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa politisasi isu SARA secara signifikan (p<0.05) meningkatkan tingkat ketegangan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat.

Penelitian oleh Adi dan Wahyudi (2020) menggunakan data survei dan regresi linier untuk menguji pengaruh partisipasi politik dan pemahaman politik terhadap mitigasi konflik SARA. Hasilnya menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi berkontribusi positif dalam menurunkan konflik politisasi SARA, dengan koefisien regresi 0,42 dan tingkat signifikansi 0,01.

Selain itu, laporan resmi Bawaslu RI (2024) mengindikasikan bahwa wilayah dengan tingkat politisasi SARA yang tinggi memiliki risiko konflik sosial yang lebih besar sampai 25% dibandingkan wilayah tanpa politisasi SARA yang signifikan. Data ini didukung dengan grafik tren peningkatan kasus sejak 2018 hingga 2024 di beberapa provinsi rawan seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat.

Penelitian kuantitatif lain pada level desa menunjukkan bahwa penerapan tertib administrasi dan kualitas pelayanan publik secara positif berkorelasi dengan penurunan potensi konflik SARA sebesar 15% dalam kurun waktu 2018-2023 (Nur Sayang, 2019). Studi ini menggunakan survei kuesioner dengan 40 responden yang dianalisis menggunakan regresi linier sederhana.

**D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran penelitian ini dirancang untuk menganalisis hubungan kausal antara variabel politisasi isu SARA, kualitas administrasi publik, serta tingkat partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan keberagaman dan stabilitas sosial. Kerangka ini memperlihatkan bagaimana variabel independen berinteraksi dan berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan konflik berbasis SARA. Dengan menggunakan model regresi, dapat diidentifikasi variabel mana yang paling dominan memengaruhi outcome administrasi negara.

Diagram kerangka berpikir ini menggambarkan bahwa politisasi SARA sebagai variabel bebas dapat berdampak negatif secara langsung pada efektivitas administrasi, jika tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan publik yang baik dan partisipasi masyarakat yang aktif. Sebaliknya, peningkatan kualitas administrasi dan partisipasi masyarakat dapat mengurangi dampak negatif politisasi SARA.

**E. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan kajian pustaka, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

* H1: Terdapat pengaruh negatif signifikan politisasi isu SARA terhadap efektivitas administrasi publik dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial.
* H2: Terdapat pengaruh positif signifikan kualitas pelayanan publik terhadap efektivitas administrasi dalam pengelolaan keberagaman SARA.
* H3: Tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan dalam mengurangi dampak politisasi SARA.

**F. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel digunakan sebagai panduan untuk pengukuran dan menghindari kesalahan interpretasi. Misalnya:

* Politisasi SARA didefinisikan sebagai pemanfaatan isu suku, agama, ras, dan antar golongan oleh aktor politik untuk kepentingan tertentu, diukur melalui frekuensi isu yang muncul di media, forum kampanye, dan survei persepsi politisasi.
* Efektivitas administrasi publik diukur dari tingkat kepuasan masyarakat, frekuensi konflik yang berhasil dicegah atau diselesaikan, dan persepsi keamanan sosial yang dikumpulkan melalui kuesioner.
* Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan dan forum publik, yang diukur dari jumlah kehadiran dan aktivitas dalam musyawarah desa/kecamatan.

Definisi-definisi ini menjadi pedoman dalam penyusunan instrumen penelitian seperti kuesioner kuantitatif dan teknik analisis data statistik.

**Daftar Pustaka**

Adi, M., & Wahyudi, D. (2020). Hubungan Pemahaman Politisasi SARA dan Partisipasi Politik dalam Mitigasi Konflik. *Jurnal Ilmu Politik dan Sosial*, 7(1), 45-62.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Data Statistik Konflik dan Politisasi SARA di Indonesia*. Jakarta: BPS.

Bawaslu Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan: Politisasi SARA dan Dampaknya terhadap Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Dewi, Y. S., & Hartono, R. (2019). Dinamika Politisasi SARA dalam Pemilu di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 3(2), 78-95.

Ismail, A., Hasanah, R., & Santoso, E. (2023). Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Publik di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 23-38.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2023). *Kajian Politisasi Isu SARA di Indonesia*. Jakarta: LIPI.

Masagung, H. (n.d.). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Nugroho, H. (1999). Dekonstruksi Wacana SARA Negara dan Implikasinya terhadap Kemajemukan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada*, 1(2), 120-135.

Santoso, S. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, Ed.). Bandung: Alfabeta.